

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, SISTEM  
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN KOMPETENSI SUMBER  
DAYA MANUSIA TERHADAP EFEKTIVITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan)**

**Oleh :  
Mei Sari Simatupang  
Pembimbing : Vince dan Susilatri**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia  
Email : [meisari1020@gmail.com](mailto:meisari1020@gmail.com)*

*The Effect Of The Government Internal Control System, Region's Financial  
Accounting System And Competence Human Resource Of Effectiveness  
Of Financial Management Area*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of the Government Internal Control System, Financial System and the Regional Human Resources Competence of the Effectiveness of Financial Management. This study was conducted in 27 work units City government in Padangsidimpuan. The sample used in this study were 81 respondents. Methods of data collection in this research is survey method with questionnaire delivered directly to the Head of Department, Head of Finance and Treasurer at each SKPD. The analytical method used is multiple regression analysis using the program Statistical Product Service Solution (SPSS). The test results show that the internal control systems of government affect the effectiveness of financial management, with a regression coefficient of 2.355 and a significance level of 0,016. The area of financial accounting system affect the effectiveness of financial management with a regression coefficient of 2.254 and a significance of 0.015. Competence of human resources affect the effectiveness of financial management with a regression coefficient of 3.503 and a significance of 0.001. While the coefficient of determination is 0.179, which means 17,9% of independent variables affect the dependent variable. While 82,1% is influenced by other variables not included in this study.*

*Keywords : Internal Control, Financial Accounting, Competenc, and Effectiveness*

**PENDAHULUAN**

Peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21

tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana PP No.21 tahun 2011 mendefinisikan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dimana untuk pengelolaan keuangan daerah ini berkaitan dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparansi dan akuntabel. Ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Gusrita, 2013).

Pada hakekatnya, orientasi reformasi pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar pengelolaan uang rakyat (*public*

*money*) dilakukan secara transparan, baik dalam tahap penyusunan, penggunaan, maupun pertanggung jawaban dengan mendasarkan pada konsep *value for money*, sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*). Dalam kaitannya dengan daerah, reformasi pengelolaan keuangan daerah sangat erat berhubungan dengan perubahan mekanisme dan instrumen pengelolaan keuangan daerah, serta perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah. Ini berarti, reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak saja fokus pada kreativitas daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, namun juga membenahan instrumen dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah saat ini kurang menunjukkan hasil yang kredibel, hal ini disebabkan karena kurang baiknya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD akan diperiksa dan diberi opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan daerah tersebut (Suprayogi, 2010). Dari seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi, kabupaten dan Kota di Indonesia yang diperiksa oleh BPK masih ada beberapa Provinsi, Kabupaten dan Kota yang mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Sedangkan pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dana publik secara efektif, efisien, ekonomi dan juga patuh terhadap

semua aturan serta mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara tepat waktu dan akuntabel (Suprayogi, 2010).

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) wajib menyampaikan laporan keuangan yang mencakup: (1) Laporan realisasi anggaran, (2) Neraca keuangan daerah, (3) Laporan arus kas, (4) Catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan daerah adalah mengatur penyusunan laporan keuangan yang merupakan salah satu kewajiban dari pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan dan mengelola keuangan daerah dalam 1 (satu) periode anggaran (Hariadi, 2010:131).

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), di Indonesia terdapat kenaikan persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta penurunan persentase opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberi Pendapat (TMP). Secara umum ini menggambarkan bahwa adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan keuangan dan penyajian suatu laporan keuangan (BPK RI IHPS I, 2014:38). Dengan adanya kenaikan persentase opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) serta penurunan persentase opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP), secara umum menggambarkan telah terjadi peningkatan yang dicapai oleh entitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya serta menyajikan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Dalam upaya pencapaian sistem pengelola keuangan daerah diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang memadai. Sistem pengendalian intern tersebut adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berpedoman pada PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP.

Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diharapkan mampu sebagai instrumen dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik membutuhkan suatu sistem yang dapat mewujudkan pelaksanaan efektivitas pengelolaan keuangan daerah tersebut yaitu Sistem Pengendalian Intern (SPI). Dimana sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Zalni dalam Turwirdani, 2015). Sistem pengendalian intern

merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan suatu organisasi sektor publik. Masing-masing lembaga pemerintah sebaiknya memiliki suatu sistem pengendalian yang agar dapat meminimalkan risiko yang ada. Sistem pengendalian intern ini sangat diperlukan didalam pemerintahan agar terhindar dari kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak-pihak didalam sebuah instansi pemerintahan tersebut.

Dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi. Dimana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan (Wati dalam Turwirdani 2015). Tujuan utama adanya kebijakan pengelolaan keuangan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government) berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif agar penatausahaan keuangan daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi (Pradita, 2010).

Berdasarkan penjelasan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah? 2) Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah? 3) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji dan mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. 2) Untuk menguji dan mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. 3) Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

## **TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

Halim (2007) mengemukakan tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab (accountability)
- 2) Mampu memenuhi kewajiban keuangan
- 3) Kejujuran
- 4) Hasil guna dan kegiatan efisien dan efektif
- 5) Pengendalian

Tahapan Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan.

### **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut: "Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan".

Tujuan sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang:

- 1) Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara.
- 2) Keandalan pelaporan keuangan.

- 3) Pengamanan aset negara
- 4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Kepmendagri No. 21 Tahun 2011 (1) mengemukakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Menurut Halim (2010:42) ada beberapa macam sistem pencatatan yang digunakan, yaitu:

#### *1) Single Entry*

Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi Penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi Pengeluaran.

#### *2) Double Entry*

Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali (double = berpasangan/ganda, entry = pencatatan). Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi Debit dan Kredit.

#### *3) Triple Entry*

Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku

anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, satuan pemegang kas pada satuan kerja maupun pada bagian keuangan atau badan/biro pengelola kekayaan daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Saleba (2014) mengatakan bahwa, Kompetensi adalah suatu yang mendasari karakteristik dari suatu individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 pasal 3, menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki pegawai negeri sipil (PNS), berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya yang memang berkapasitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika

akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, (Sugandhi, 2013).

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 dinyatakan bahwa :

1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa apabila sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan, maka keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi serta kepatuhan terhadap perundang-undangan bisa tercapai sehingga pengelolaan keuangan daerah akan terlaksana secara efektif. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diambil sebuah hipotesis sebagai berikut:

H1: Diduga Sistem pengendalian intern pemerintah

berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan daerah**

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi (KepMendagri No.29 tahun 2002 Pasal 70 Ayat 1). PP no 71 tahun 2010 menetapkan bahwa pemerintah menerapkan SAP dengan dasar akuntansi berbasis akrual, Permedagri No. 64 tahun 2013 juga mengatakan bahwa daerah menerapkan sistem akuntansi pemerintah dengan dasar akuntansi berbasis akrual untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif.

Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, asset, dana selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara.

Dengan adanya Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan (PP No. 71

Tahun 2010). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diambil sebuah hipotesis sebagai berikut:

H2: Diduga Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan keuangan Daerah**

Berdasarkan Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 pasal 3, dinyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS), berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kompetensi sumber daya manusia merupakan pengetahuan, kemampuan dan sikap perilaku seseorang atau individu dalam suatu organisasi (kelembagaan) untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

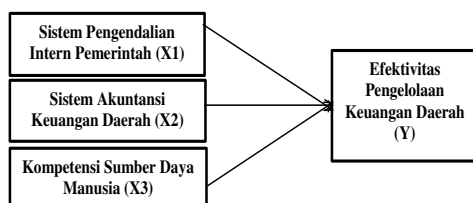
Iskandar (2008) menyatakan bahwa setiap bagian dalam pemerintahan harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang telah ditentukan. Begitupun bagian keuangan yang harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya. Hal inilah yang mendorong instansi pemerintah untuk terus berkembang dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki melalui pelatihan yang diselenggarakan dan kebijakan

lainnya yang mendukung pencapaian tujuan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diambil sebuah hipotesis sebagai berikut:

H3: Diduga Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

**Gambar 1**  
**Model Kerangka Pemikiran**



Sumber : *Data Olahan, 2016.*

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padangsidimpuan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padangsidimpuan. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Para pegawai yang menjalankan fungsi sebagai Pengelola Keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Responden

dalam penelitian ini adalah Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran/Barang, Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara SKPD sehingga tiap SKPD ditetapkan sebanyak 3 orang yang menjadi responden sehingga didapatkan sebanyak 81 responden.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber ahli. Prosedur pengumpulan data menggunakan pengumpulan data primer, yaitu kuesioner. Kuesioner yang telah terstruktur dibagi secara langsung kepada responden untuk diisi

## Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda yaitu dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = efektivitas pengelolaan keuangan daerah
- a = konstanta
- $\beta_1$  = koefisien regresi X1
- $\beta_2$  = koefisien regresi X2
- $\beta_3$  = koefisien regresi X3
- X1 = sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
- X2 = sistem akuntansi keuangan daerah
- X3 = kompetensi sumber daya manusia (SDM)
- e = kesalahan pengganggu (error)

## Definisi Operasional Variabel

a. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah



Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatannya.

b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

c. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi pemerintah daerah yang disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

d. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Statistik Deskriptif Variabel**

Analisis data dilakukan terhadap 72 jawaban responden yang memenuhi kriteria untuk pengolahan data. Data yang diolah merupakan hasil rata-rata jawaban responden untuk masing-masing variabel, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Tabel 1 menunjukkan hasil statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS, sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

| Model              | N  | Min   | Max   | Mean    | Std. Deviation |
|--------------------|----|-------|-------|---------|----------------|
| X1                 | 72 | 35,00 | 72,00 | 59,7778 | 8,33662        |
| X2                 | 72 | 39,00 | 55,00 | 47,8056 | 4,65920        |
| X3                 | 72 | 26,00 | 45,00 | 39,1806 | 3,52587        |
| Y                  | 72 | 27,00 | 45,00 | 37,3750 | 3,87639        |
| Valid N (listwise) | 72 |       |       |         |                |

Sumber : Data Olahan, 2016.

**Hasil Uji Validitas**

Sistem pengendalian intern pemerintah yang diukur dengan 15 item pertanyaan seluruhnya dinyatakan valid, Sistem akuntansi

keuangan daerah yang diukur dengan 11 item pertanyaan seluruhnya dinyatakan valid, Kompetensi sumberdaya manusia yang diukur dengan 9 item pertanyaan seluruhnya dinyatakan valid, Efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang diukur dengan 9 item pertanyaan seluruhnya dinyatakan valid.

### Hasil Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Teknik yang digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas adalah cronbach alpha dengan cara membandingkan nilai alpha dengan standarnya.

**Tabel 2**  
**Uji Reliabilitas**

| Variabel | Kesimpulan |
|----------|------------|
| X1       | Reliabel   |
| X2       | Reliabel   |
| X3       | Reliabel   |
| Y        | Reliabel   |

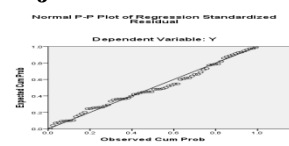
Sumber : Data Olahan, 2016.

Pada Tabel 2 uji reliabilitas dapat disimpulkan indikator atau kuesioner yang digunakan variabel sistem pengendalian intern pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dinyatakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

### Hasil Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dapat dilihat dari normal probability plot sebagai berikut :

**Gambar 2**  
**Uji Normalitas Data**



Sumber : Data Olahan, 2016.

Berdasarkan Grafik normal probability plot of regression diatas memperlihatkan titik-titik menyebar berhimpitan di sekitar diagonal dan ini menunjukkan data dalam model regresi berdistribusi normal.

### Hasil Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini, gejala multikolonieritas dilihat dari: (1) nilai Tolerance dan lawannya (2) Variance Inflation Factor (VIF) sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Uji Multikolinearitas**

| Model | Collinearity Statistics |       |
|-------|-------------------------|-------|
|       | Tolerance               | VIF   |
| 1 X1  | .820                    | 1.219 |
| X2    | .898                    | 1.113 |
| X3    | .848                    | 1.179 |

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

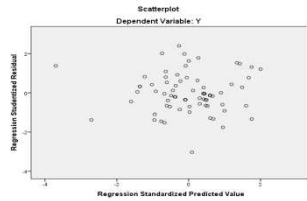
Sumber : Data Oalahan, 2016.

Berdasarkan Tabel 3 dari hasil perhitungan hasil analisis data diatas, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan tolerance > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari masalah multikolinearitas.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat diperhatikan pada Gambar Scatterplot sebagai berikut:

**Gambar 3**  
**Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : Data Olahan, 2016.

Hasil uji yang ditampilkan pada Gambar 3 terlihat titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat diartikan tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

**Hasil Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test). Berikut ini adalah hasil pengujian autokorelasi dengan uji Durbin-Watson:

**Tabel 4**  
**Uji Autokorelasi**

| Model | Durbin-Watson |
|-------|---------------|
| 1     | 1.720         |

Sumber : Data Olahan, 2016.

Dari tabel diatas, diperoleh nilai Durbin Watson terletak antara - 2 dan 2 yaitu  $-2 < 1,720 < 2$ . Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda (Multiple Regression

Analysis) untuk hipotesis satu, dua dan tiga. Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen).

**Tabel 5**  
**Analisis Regresi Linier Berganda**

| Model        | Unstandardized Coefficients |            | T     | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|-------|------|
|              | B                           | Std. Error |       |      |
| 1 (Constant) | 12.929                      | 6.538      | 1.977 | .052 |
| X1           | .020                        | .055       | 2.355 | .016 |
| X2           | .118                        | .094       | 2.254 | .015 |
| X3           | .450                        | .128       | 3.503 | .001 |

Sumber : Data Olahan, 2016.

Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 12,929 + 0,020X1 + 0,118X2 + 0,450X3 + e$$

Adapun nilai t tabel dalam penelitian ini dengan tingkat signifikansi 5% adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} T\text{-tabel} &= 72 - 3 - 1 : 0,05 / 2 \\ &= 68 : 0,025 \\ &= \pm 1,977 \end{aligned}$$

**Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengujian hipotesis pertama dapat dilihat dari tabel 5 hasil analisis regresi dapat dilihat melalui nilai p value. Jika t hitung > t tabel dan p value < 0,05 maka H1 diterima. Dari hasil diatas dapat diperoleh t hitung 2,355 > t tabel 1,977 dan signifikansi  $0,016 < 0,05$ ,

yang berarti H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya sistem pengendalian intern pemerintah maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Padangsidimpuan akan semakin meningkat. Pengelolaan keuangan daerah akan terwujud dengan efektif apabila suatu organisasi pemerintah mampu menciptakan, menerapkan, dan memelihara sistem pengendalian intern, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan suatu instansi, pengamanan aset negara serta meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat pemerintah daerah telah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah dengan baik maka dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dapat berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil yang akan dicapai.

### **Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengujian hipotesis kedua dapat dilihat dari tabel 5, hasil analisis regresi dapat dilihat melalui nilai p value. Jika t hitung > t tabel

dan p value < 0,05 maka H2 diterima. Dari hasil diatas dapat diperoleh t hitung 2,254 > t tabel 1,977 dan signifikansi 0,015 < 0,05, yang berarti H2 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin tinggi sistem akuntansi keuangan daerah, maka semakin tinggi pula efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan apabila semakin rendah sistem akuntansi keuangan daerah, maka semakin rendah pula efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah hal ini dikarenakan penerapan sistem akuntansi pada dinas sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), setiap transaksi keuangan yang terjadi selalu diidentifikasi sebelum dianalisis, adanya pengidentifikasian terhadap pencatatan, setiap bagian keuangan selalu melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi, dan pencatatan transaksi yang ada disertai oleh bukti.

Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, berbagai upaya berupa kebijakan, aturan, termasuk pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah yang terarah dan sistematis. Sistem akuntansi keuangan daerah menurut definisi Darise (2008:41) adalah serangkaian proses atau prosedur, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai dengan efektif dan efisien sehingga pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan pada akhirnya dapat mengalokasikan dana yang tersedia untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengujian hipotesis ketiga dapat dilihat dari tabel 5, hasil analisis regresi dapat dilihat melalui nilai p value. Jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel dan  $p$  value  $<$  0,05 maka  $H_3$  diterima. Dari hasil diatas dapat diperoleh  $t$  hitung 3,503  $>$   $t$  tabel 1,977 dan signifikansi 0,001  $<$  0,05, yang berarti  $H_3$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah semakin berkompeten sumber daya manusia maka pengelolaan keuangan daerah semakin efektif.

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang efektif, maka organisasi pemerintah daerah harus memiliki

sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya. Baik atau buruknya pengelolaan keuangan daerah disebabkan oleh sumber daya manusia yang ada pada pemerintah tersebut. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia adalah komponen utama yang berfungsi sebagai motor penggerak dalam menjalankan pemerintahan.

Ketika pemerintah daerah telah memiliki aparat pengelola keuangan yang berkompetensi, maka pengelolaan keuangan daerah akan berjalan dengan efektif. Dengan demikian, semakin berkompetensi aparat pengelolaan keuangan maka pengelolaan keuangan daerah akan berjalan dengan efektif, efisien dan ekonomis. Sebaliknya, jika organisasi pemerintah tidak memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi dibidang keuangan, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan efektif.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan berikut ini:

- 1) Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

## Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini untuk penelitian selanjutnya yaitu :

- 1) Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas daerah penelitian dan memperbanyak jumlah responden.
- 2) Metode penelitian yang dipakai untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti metode wawancara langsung, survei lapangan, observasi dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta: Indeks
- Gusrita, Ririn. 2013. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kab. Inhil). Skripsi. Universitas Riau. Pekanbaru
- Halim, Abdul dan Damayanti Theresia Woro. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2010. Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hariadi, Pramono, dkk. 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Iskandar, Joni. 2015. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi. Jurusan Akuntansi Universitas Riau. Pekanbaru
- Pradita, Gilang. 2010. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama, Bandung
- Saleba, Siti Nurjannah. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal, Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Sugandhi, Joe. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal Akuntansi dan Komitmen Organisasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kuansing. E-Jurnal,

- Jurusan Akuntansi  
Universitas Riau. Pekanbaru.
- Tentang Pedoman  
Pengelolaan Keuangan  
Daerah
- Suprayogi, Angga. 2010. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung). Skripsi. Universitas Pasundan
- Turwirdani, Lopita. 2015. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi. Universitas Riau.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- KepMendagri No.29 tahun 2002 Pasal 70 Ayat 1
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Permedagri No. 64 tahun 2013
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- <http://www.bpk.go.id/ihrs> di akses tanggal 10 April 2016